

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulisan ini akan penulis kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah diatas. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Salminata, yang berjudul “Analisis Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Di Provinsi Riau”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan fungsi Bappedalitbang Provinsi Riau belum berjalan secara maksimal, yang disebabkan karena SDM nya yang kurang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pembangunan daerah, selain itu kurangnya anggaran juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas Bappedalitbang sehingga menyebabkan kurang optimalnya fungsi Bappedalitbang itu sendiri.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji yakni badan perencanaan pembangunan kota, sumber data yang digunakan serta pokok kajian yaitu mengenai peningkatan perencanaan pembangunan kota. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian diatas yakni membahas analisis fungsi Bappeda dalam pembangunan sedangkan yang diteliti membahas tentang kinerja Bappeko dalam pembangunan kota.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Albashita, yang berjudul “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pengembangan UMKM Di Kabupaten Pringsewu (Studi di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam melakukan pengembangan UMKM yang ada di kecamatan Pringsewu, Bappeda memiliki peran berkoordinasi dengan OPD instansi struktural terkait dalam melakukan perencanaan program pembangunan

UMKM bersama OPD terkait, serta memonitoring dan mengevaluasi program pembangunan UMKM yang dijalankan OPD. Dampak bagi pelaku usaha UMKM setelah ada pengembangan dari Bappeda, Sebagian besar pelaku usaha merasa bahwa pembinaan terhadap pengembangan UMKM telah mendapat manfaat banyak bagi usaha mereka seperti, bantuan permodalan usaha, bantuan mesin dan alat-alat produksi, bantuan perlengkapan usaha, kemudahan dalam perizinan usaha, pemberian sertifikat teruji kelayakan higienis makanan, pelatihan-pelatihan UMKM baik itu secara online maupun offline, seminar-seminar entrepreneurship, marketing, branding dan lain-lainnya. Tentunya hal tersebut dapat sangat bermanfaat bagi perkembangan usaha.

Persamaan Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji yakni badan perencanaan pembangunan daerah, sumber data yang digunakan serta pokok kajian yaitu mengenai peningkatan perencanaan pembangunan daerah. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian diatas yakni membahas peranan Bappeda dalam pengembangan UMKM daerah sedangkan yang diteliti membahas tentang kinerja Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Henrawan, dengan judul “Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Kota ParePare Perspektif Siyasah Idariyah”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Bappeda Kota ParePare berperan selaku leading sektor dalam program pemaangunan, menunjukkan bahwa pengusulan musrenbang pada tingkat kelurahan sampai ke tingkat kecamatan hanya sebagian terakomodir sampai ke tingkat kota, tentunya hal ini diperhitungkan dengan sangat matang dengan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dalam APBD.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji yakni badan perencanaan pembangunan daerah, sumber data yang digunakan serta pokok kajian yaitu mengenai peningkatan perencanaan pembangunan daerah. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian diatas

yakni membahas peranan Bappeda dalam pengembangan infrastruktur daerah sedangkan yang diteliti membahas tentang kinerja Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatang, dengan judul “Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Sarana Infrastruktur Di Kota Palopo”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Peranan Bappeda antar lain perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, serta melakukan evaluasi. Tetapi Bappeda lebih fokus terhadap perencanaan pembangunan daerah termasuk pembangunan sarana infrastruktur fisik, dan dalam hal pelaksanaan Bappeda melakukan kerja sama dengan OPD teknis yang terkait. Eksistensi Bappeda Kota Palopo dalam pencapaian kerjanya dapat diukur melalui program yang dicanangkan sebagai bagian dari proses perencanaan program pembangunan serta menyerasikan dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan anggaran pemerintah daerah (RAPD). Perencanaan yang dimaksud yaitu merencanakan, tujuan sasaran, program, dan kegiatan-kegiatan Kota Palopo dalam bentuk pembangunan dengan melalui pendekatan politik, bottom up, top down, serta teknokratik. Dalam penetapan rencana pembangunan Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja- SKPD, kemudian rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang yang kemudian dilakukan musyawarah dengan Badan Legislatif Kota Palopo untuk menetapkan RKPD serta penetapan RAPBD.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji yakni badan perencanaan pembangunan daerah, sumber data yang digunakan serta pokok kajian yaitu mengenai peningkatan perencanaan pembangunan daerah. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian diatas yakni membahas peranan Bappeda dalam pengembangan infrastruktur daerah sedangkan yang diteliti membahas tentang kinerja Bappeda dalam perencanaan

pembangunan daerah.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kinerja Pemerintah Kota Mojokerto dalam Pembangunan Daerah

Dalam pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diamanatkan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara. Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Kinerja Bappeko Kota Mojokerto

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Kota Mojokerto dalam perencanaan pembangunan bisa dievaluasi melalui berbagai indikator dan aspek. Berikut adalah beberapa poin penting yang biasanya menjadi fokus dalam mengevaluasi kinerja Bappeko dalam perencanaan

pembangunan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan :

- a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) : Bappeko bertanggung jawab untuk menyusun RPJMD yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.
- b) Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) : Bappeko juga harus menyusun Renstra dan RKPD yang efektif, realistis, dan bisa diimplementasikan.

2. Pelibatan Masyarakat:

Musyawaharah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang): Kinerja Bappeko dapat dinilai dari bagaimana mereka melibatkan masyarakat dalam proses Musrenbang, termasuk seberapa efektif forum tersebut dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.

3. Koordinasi Antar Lembaga:

Sinkronisasi dan Sinergi: Kinerja Bappeko juga ditentukan oleh kemampuannya dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program dan kegiatan antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) agar tidak terjadi tumpang tindih dan bisa lebih efisien.

4. Penggunaan Data dan Informasi:

- a) Basis Data yang Akurat: Efektivitas perencanaan sangat bergantung pada data yang digunakan. Bappeko harus mampu menyediakan data yang akurat, up-to-date, dan relevan untuk dasar perencanaan.
- b) Analisis dan Evaluasi: Penggunaan metode analisis yang tepat dan evaluasi berkala terhadap program pembangunan juga menjadi indikator penting kinerja Bappeko.

5. Pelaksanaan dan Monitoring:

- a) Implementasi Program: Bappeko harus memantau pelaksanaan program dan memastikan bahwa program-program yang direncanakan berjalan sesuai jadwal dan anggaran yang ditetapkan.
- b) Evaluasi dan Penyesuaian: Kinerja Bappeko juga terlihat dari

kemampuannya dalam melakukan evaluasi berkala dan melakukan penyesuaian jika ada program yang tidak berjalan sesuai rencana.

6. Transparansi dan Akuntabilitas:

- a) Pelaporan dan Dokumentasi: Kinerja Bappeko dapat dinilai dari transparansi dalam pelaporan dan dokumentasi kegiatan perencanaan pembangunan.
- b) Akuntabilitas Publik: Bappeko harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasil perencanaan pembangunan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.

7. Inovasi dalam Perencanaan:

- a) Pemanfaatan Teknologi: Penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan, seperti penggunaan sistem informasi geografis (GIS) dan aplikasi perencanaan lainnya, dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi perencanaan.
- b) Pendekatan Partisipatif: Inovasi dalam metode partisipatif yang melibatkan berbagai pihak (pemerintah, swasta, masyarakat) dalam perencanaan pembangunan.

Untuk evaluasi lebih spesifik tentang kinerja Bappeko Kota Mojokerto, diperlukan data dan laporan kinerja tahunan dari instansi terkait serta feedback dari masyarakat dan stakeholder pembangunan lainnya.

2.3 Kajian Teori

2.3.1 Teori Kinerja Organisasi

Definisi kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Bastian dalam Hessel Nogi (2005 : 175) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Senada dengan pendapat Bastian dalam Hessel Nogi tersebut, Encyclopedia of Public Administration and Public Policy Tahun 2003 dalam Yeremias T. Keban (2004 : 193), juga menyebutkan kinerja dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan.

2.3.2 Teori Pembangunan

Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Pembangunan juga bentuk dari hasil kegiatan dan program pemerintah bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial dan lainnya dengan cara meningkatkan pembangunan. Beberapa para ahli mendefinisikan arti dari pembangunan, Menurut Sondang P. Siagian Pembangunan merupakan usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa.

Kemudian menurut Ginanjar Kartasmita pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sedangkan menurut Effendi (2016) pembangunan merupakan upaya dalam meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Secara umum, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh para birokrat perencana pembangunan untuk membuat suatu perubahan sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

2.3.3 Teori Perencanaan Pembangunan Daerah

Suatu perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu arahan dalam penggunaan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Di negara berkembang terutama di Indonesia perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk membangun suatu daerah karena pembangunan daerah merupakan bagian internal dalam perencanaan pembangunan nasional maka penyusunan perencanaan yang matang sangat diperlukan. Menurut Riyadi dan Deddy (dalam Mhd Asrofi, 2005:7) Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang

melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

2.4 Gambaran Umum Bappeko Kota Mojokerto

Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Kota Mojokerto adalah lembaga pemerintahan daerah yang memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan kota dan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kota Mojokerto. Bappeko berperan sebagai motor penggerak dalam proses perencanaan pembangunan untuk mematisikan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terdapat tiga bidang yang ada di Bappeda Kota Mojokerto antara lain :

1. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
2. Bidang Perencanaan Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan
3. Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi

Bappeko Kota Mojokerto memiliki Visi Mewujudkan Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, dan sejahtera melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Misi :

1. Menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan transparan.
2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya daerah untuk pembangunan berkelanjutan.
3. Memperbaiki kualitas dan ketersediaan data sebagai dasar perencanaan yang akurat.
4. Meningkatkan inovasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
5. Memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.

Bappeko Kota Mojokerto melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung tujuan pembangunan, antara lain:

1. Penyusunan dokumen perencanaan strategis dan teknis.
2. Penyelenggaraan forum-forum diskusi dan konsultasi publik untuk menjaring aspirasi masyarakat.
3. Monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah.
4. Pengembangan dan penyediaan sistem informasi dan data pembangunan.
5. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur pemerintah daerah.

Bappeko Kota Mojokerto berperan sentral dalam menentukan arah pembangunan kota, memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

1.4.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bappeko Kota Mojokerto

Bappeko Kota Mojokerto merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Bappeko berfungsi sebagai lembaga yang merumuskan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah. Bappeko Kota Mojokerto memiliki tugas utama untuk membantu walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Tugas-tugas Bappeko meliputi:

1. Bappeko memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
2. Bappeko melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. **Perumusan Kebijakan Teknis:**

Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur.
 - b. **Koordinasi:**

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan OPD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
- 2) Mengintegrasikan rencana pembangunan sektoral ke dalam rencana pembangunan daerah.

c. **Pembinaan:**

- 1) Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada OPD dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- 2) Mengembangkan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah.

d. **Pengendalian dan Evaluasi:**

- 1) Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk memastikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
- 3) Menyusun laporan hasil evaluasi yang digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyusunan rencana pembangunan berikutnya.

e. **Penyusunan Rencana Pembangunan:**

- 1) Menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD).
- 2) Mengembangkan rencana strategis daerah yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

f. **Penelitian dan Pengembangan:**

- 1) Melakukan kajian, penelitian, dan analisis untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan.
- 2) Mengembangkan inovasi dan metode baru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

g. **Pengelolaan Data dan Informasi:**

- 1) Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data serta informasi pembangunan daerah.

- 2) Mengembangkan sistem informasi pembangunan yang dapat diakses oleh berbagai pihak untuk mendukung proses perencanaan yang partisipatif dan transparan.

1.4.2 Tujuan dan Sasaran Bappeko Kota Mojokerto

Tujuan dari Bappeko Kota Mojokerto adalah untuk mendukung tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Secara spesifik, tujuan Bappeko Kota Mojokerto meliputi :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, dengan menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan menyusun strategi dan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, peningkatan investasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dengan merencanakan pemanfaatan sumber daya alam, manusia, dan keuangan secara optimal dan berkelanjutan untuk pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan menyusun kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
5. Memperkuat infrastruktur dan pengembangan wilayah, dengan merencanakan pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas, aksesibilitas, dan pengembangan wilayah secara merata.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bappeko Kota Mojokerto menetapkan beberapa sasaran yang lebih spesifik, antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan:

Tersusunnya dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang sesuai dengan kaidah perencanaan dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan:

Terwujudnya koordinasi yang efektif antara OPD, pemerintah pusat, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

3. Pengembangan Ekonomi Lokal:

Peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan, peningkatan investasi, dan penguatan UMKM.

4. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM):

Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat sehingga tercermin dalam peningkatan IPM Kota Mojokerto.

5. Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan:

Pembangunan infrastruktur fisik dan sosial yang merata dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas tata ruang dan lingkungan hidup.

6. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah:

Peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.

7. Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan:

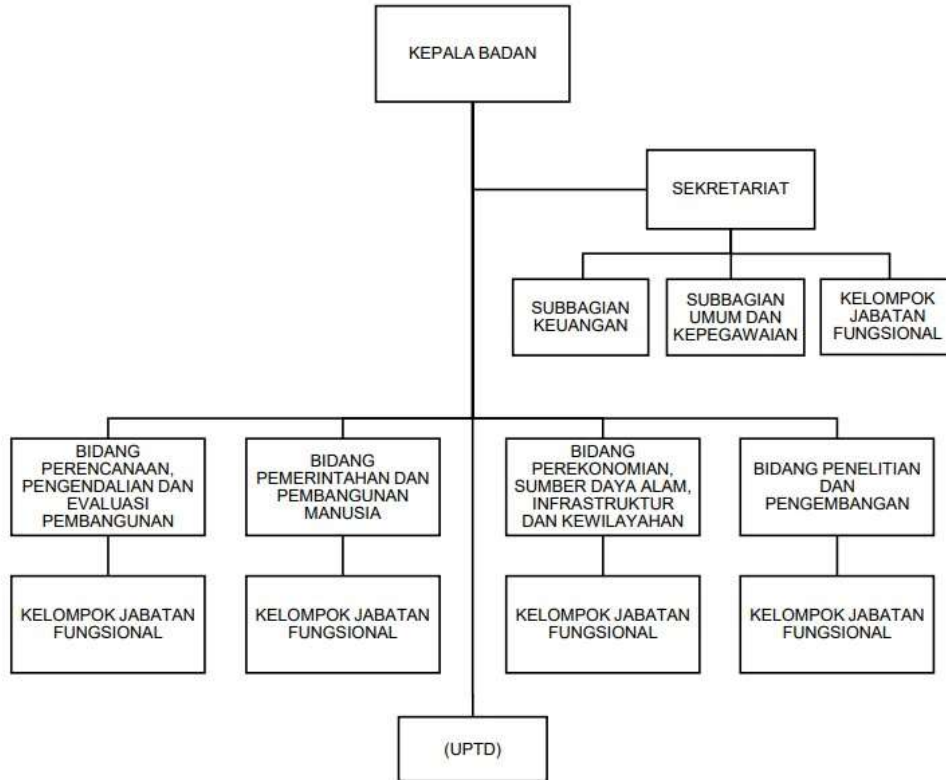
Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

8. Pengembangan Inovasi dalam Pembangunan:

Penerapan inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang efektif dan efisien.

Dengan menetapkan tujuan dan sasaran ini, Bappeko Kota Mojokerto berupaya untuk memastikan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik, berfokus pada pencapaian hasil yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, dan mampu menjawab tantangan serta peluang pembangunan yang ada.

1.4.3 Struktur Organisasi



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sumber: Diolah oleh peneliti

Susunan organisasi Bappeko Kota Mojokerto terdiri atas :

- a. Kepada Bappeko
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Keuangan, dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
 - 2) Sub Bidang Data dan Informasi
 - 3) Sub bidang pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Pemerintahan
 - 2) Sub Bidang Pembangunan Manusia
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
- 1) Sub Bidang Perekonomian
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam
 - 3) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
- 1) Sub Bidang Penelitian Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan
 - 2) Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Pembangunan
 - 3) Sub Bidang Inovasi Teknologi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

